

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya dari pemerintah, masyarakat desa dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendorong, mendukung dan memfasilitasi masyarakat, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa, memperkuat masyarakat desa, dan mengembangkan rencana pembangunan. Meningkatkan jumlah SDM desa dan mewujudkan desa mandiri. Desa merupakan ujung tombak dari kemajuan desa itu sendiri, namun peran masyarakat dan instansi pemerintahan seperti Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai pendukung pemerintah desa sangat penting untuk mendorong desa mencapai tujuan yang diinginkan.² Memberdayakan rakyat mampu dilakukan menggunakan memanfaatkan potensi wilayah desa tempat masyarakat tinggal . Potensi lokal adalah kekayaan alam, budaya, & asal daya insan yang masih ada pada sebuah wilayah.³

Sebagai unit politik terkecil, desa menempati posisi strategis sebagai pilar pembangunan nasional. Desa ini mempunyai potensi yang besar tidak hanya dari segi jumlah penduduknya tetapi juga dari segi ketersediaan sumber daya alam yang kaya. Jika kedua potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal maka masyarakat desa akan semakin

² Simangunsong, Perwira, dkk, "*Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Mewujudkan Desa Mandiri Di Desa Banjar Jaya: Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Mewujudkan Desa*", Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol 2(1), 2019, hal 9

³ Kiki Endah, "*Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa*", Jurnal Moderat, Vol 6 (1), 2020, hal 137

sejahtera. Dapat dipahami bahwa saat ini masih banyak titik lemah pembangunan di tingkat desa. Kelemahan pembangunan di tingkat desa ini antara lain karena masalah potensi seperti SDM yang kurang berkualitas, teknologi, dll.⁴ Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah mendirikan lembaga keuangan yang diberi nama Badan Usaha Desa (BUMDes). Selain itu, BUMDesa juga dapat mendirikan usaha untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dijalankan oleh masyarakat desa dan pemerintah desa, untuk memperkuat perekonomian desa, dan didasarkan pada kebutuhan dan kemampuan desa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung serta Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung yang berbunyi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Dalam pengelolaan usaha desa, BUMDes tidak berfungsi maksimal karena banyak pemangku kepentingan mulai dari pengurus desa hingga

⁴ Ratna Aziz Prasetyo, "Peranan BUMDes dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro", *Jurnal Dialetika*, vol 9 (1), 2016, hal 86

pengurus BUMDes yang tidak memahami tujuan dan prinsip BUM Desa itu sendiri.⁵ Seluruh BUMDesa ingin mendapat bimbingan dari pihak terkait agar unit usaha BUMDes dapat tumbuh dan berkembang.

BUMDes didirikan dan dioperasikan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk memperkuat perekonomian desa berdasarkan potensi yang dimiliki. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Keputusan Desa Tahun 2015 mengatur bahwa pendirian BUMDes harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemungkinan desa yang ada.⁶ Pemetaan usaha penting untuk pengembangan usaha BUMDes, agar bentuk usaha yang akan diciptakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan BUMDes itu sendiri dan desa. dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Tujuan didirikannya Badan Usaha Desa (BUMDes) adalah untuk meningkatkan perekonomian desa dan masyarakat, meningkatkan pendapatan awal desa, dan meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai kebutuhan masyarakat.⁷

Dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi melalui BUMDesa, yang terpenting dalam program pemberdayaan adalah rangkaian proses dimana proses pemberdayaan memerlukan perencanaan dan analisis yang matang untuk mencapai tujuan. Proses pemberdayaan biasanya meliputi 3 aspek

⁵ Dian Apriyanti, Kiki Endah, dkk, "Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis", *Jurnal Moderat*, vol 5 (3), 2019, hal 263

⁶ Ama Zunaidah, Eka Askafi, dkk, "*Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*", *jurnal otonomi*, vol 20 (2), 2020, hal 242

⁷ Syamsul Bahri Gayo, Erlina, dkk, "*Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Pedesaan*", *jurnal media komunikasi geografi*, vol 21 (2), 2020, hal 203

yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Menurut Nadler dalam Hardjana, pengembangan adalah pembelajaran yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu untuk memperbesar peluang peningkatan kinerja.⁸ Dalam teori Ismawan, Priyono & Pranaka menyatakan bahwa ada lima program strategi pemberdayaan: pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kelompok terorganisir, pengembangan modal masyarakat, pengembangan usaha produktif, dan pemberian informasi yang tepat. Tujuan pemberdayaan adalah untuk meningkatkan kinerja aktual sesuai dengan kapasitas yang ada sehingga produktivitas dan pendapatan kelompok swadaya meningkat.⁹

Cara pandang potensi desa untuk mengembangkan perekonomian pedesaan melalui lembaga pemberdayaan yang disebut Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang dapat dikelola secara profesional berdasarkan potensi alam, sumber daya manusia, dan lain-lain.¹⁰ Sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, pemerintah desa bias mendirikan BUMdesa menurut peraturan desa yang diurus oleh pemerintahan desa dan masyarakat di desa.

BUMDesa memiliki fungsi fasilitas usaha desa, berarti BUMDes berusaha menghasilkan keuntungan dengan membawa sumber daya lokal

⁸ Hardjana, Agus M. 2001, *Training SDM yang Efektif*, Kanisius : Yogyakarta

⁹ Ristiana Ristiana, Amin Yusuf, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa di Desa Wisata Lerep", *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, vol 4 (1), 2020, hal 93

¹⁰ Siti Rahayu, Rury Febrina, "Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui BUMDes di Desa Sugai Nibung", *jurnal trias politika*, vol 5 (1), 2021, hal 50

yaitu barang dan jasa ke pasar.¹¹ Berbagai upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung nantinya dapat dimanfaatkan BUMDes untuk pengembangan unit usahanya

Tidak semua unit usaha yang dijalankan BUMDes di Kabupaten Tulungagung ini berjalan lancar, bahkan ada beberapa BUMDes tidak memiliki unit usaha, hal ini dikarenakan kurangnya mengolah potensi desa yang ada, seperti SDM yang kurang berkualitas, sosial, teknologi, keuangan, dll. Melihat permasalahan BUMDes tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung harus tetap berusaha untuk tetap memberikan pembinaan dan evaluasi terhadap kegiatan pengembangan unit usaha milik BUMDes. Peneliti melakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran dan strategi terbaik dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam hal pengembangan unit usaha yang dimiliki BUMDes agar unit usahanya tidak mati.

Berkaitan dengan pengembangan Unit Usaha milik Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), Dilihat dari seluruh web Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang ada di Jawa Timur ini salah satunya DPMD Tulungagung memiliki strategi yang berbeda dari Dinas PMD Kabupaten lain, Dinas PMD Tulungagung memiliki marketplace dengan nama Pasar Desa, dimana marketplace tersebut bisa meningkatkan penjualan setiap BUMDes. Disisi lain Dinas PMD berkewajiban mengarahkan, memantau dan mengevaluasi potensi untuk pengembangan BUMDes dan unit

¹¹ Wijanarko, Agung Septiawan, "*Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pandan Krajan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto*" (Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Skripsi, 2012)

usahanya. Karena program BUMDes yang dikembangkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masih belum berjalan efektif.¹²

Di mana terlihat bahwa pengurus BUMdesa belum optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, belum tergalinya sumber-sumber potensi desa yang mengakibatkan dari beberapa BUMDes yang ada di Kabupaten Tulungagung unit usaha yang dijalankan BUMDes tersebut tidak sepenuhnya berjalan lancar, Oleh karena itu penelian yang saya lakukan untuk mencari tahu bagaimana strategi dan pembinaan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pengembangan unit usaha milik BUMDes yang tidak berjalan optimal.

B. Fokus Masalah

1. Bagaimana Dinas PMD mengangkat potensi desa sehingga dapat mempengaruhi perkembangan BUMDes?
2. Apa saja kendala dan solusi yang dihadapi Dinas PMD dalam upaya pengembangan unit usaha BUMDes?

¹² Dian Apriyanti, Kiki Endah, dkk, "Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis", jurnal moderat, vol 5 (3), 2019, hal 263

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana Dinas PMD mengangkat potensi desa yang bisa mempengaruhi perkembangan BUMDes sehingga dapat menjadikan peningkatan pada unit usaha yang dimiliki BUMDes.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dan solusi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam upaya pengembangan unit usaha milik BUMDes.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan penelitian dapat memberikan manfaat baik untuk kepentingan ilmiah maupun kepentingan praktis, yakni sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoristis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan dan mengembangkan ilmiah dari peneliti maupun pembaca terkait Potensi Desa berpengaruh penting terhadap pengembangan BUMDesa dan pembaca mampu menerima wawasan yang ada yang nantinya dapat dijadikan sebagai referensi.

2. Kegunaan Praktis :

- a. Bagi Dinas PMD

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberi manfaat dan membawa pengaruh yang luar biasa bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dimana penelitian ini nantinya dapat

meningkatkan kinerja Dinas PMD mengenai pengembangan unit usaha milik BUMDes dengan masalah-masalah yang dihadapi dalam penelitian ini.

b. Bagi BUMDes

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberi manfaat dan membawa pengaruh yang luar biasa bagi bisnis yang nantinya dapat meningkatkan pengembangan unit usaha milik BUMDes di masing-masing desa.

c. Bagi Peneliti

Sebagai diharapkan penelitian dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan memberi banyak manfaat khususnya sebagai referensi serta penambah pengalaman, serta melatih tanggung jawab terhadap masalah yang akan dihadapi.

d. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan keilmuan khususnya pengembangan BUMDesa, sebagai bahan referensi atau rujukan dan bahan tambahan pustaka pada perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup adalah pembatasan masalah terhadap subjek yang diteliti, dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan penelitian dengan cara yang lebih efisien dan efektif dalam membedakan aspek-

aspek tertentu dari objek tersebut. Ruang lingkup pada penelitian ini yaitu, peneliti lebih memfokuskan pada judul penelitian dimana akan fokus mengenai bagaimana peran dan strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pengembangan unit usaha milik BUMDesa berdasarkan Potensi yang dimiliki desa.

2. Batasan Penelitian

Batasan penelitian disini adalah usaha atau upaya peneliti untuk mempersempit masalah sedemikian rupa sehingga peneliti lebih fokus pada masalah yang diteliti. Tujuan dari definisi masalah ini adalah untuk mengidentifikasi faktor mana yang termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian. Peneliti memberikan batasan masalah dan hanya meneliti mengenai strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pengembangan unit usaha milik BUMDes yang sesuai dengan analisis potensi desa, dan bagaimana BUMDes melalui potensinya mampu menjadikan BUMDes dengan unit usaha maju.

F. Penegasan Istilah

1. Penegasan Secara Konseptual

a. Strategi

Strategi adalah rencana tindakan yang disengaja untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi dapat didefinisikan sebagai arah dan ruang lingkup organisasi yang dirancang secara ideal untuk jangka panjang, mengadaptasi sumber daya terhadap perubahan

lingkungan, terutama pasar, pelanggan, dan klien, untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan.

b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang dipimpin oleh seorang Manajer Pelayanan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Penguatan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerahnya, yaitu penguatan usaha ekonomi pedesaan dan penguatan kemasyarakatan dan desa terkait tugas tambahan yang diberikan kepada instansi pemerintah daerah dan kabupaten.¹³

c. Pengembangan

Pengembangan Kamus Bahasa Indonesia (KBI) adalah proses mengembangkan sesuatu. Dari pengertian pengembangan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengembangan merupakan perluasan atau internal materi pembelajaran, dari situlah muncul tujuan.

Menurut Nadler dalam Hardjana, pengembangan adalah pembelajaran yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu

¹³ Wikipedia, "*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*", dalam <https://sampangkab.go.id/dinas-pemberdayaan-masyarakat-desa/#:~:text=Dinas%20Pemberdayaan%20Masyarakat%20Desa%20Merupakan,Bupati%20melalui%20Sekretaris%20Daerah%20Kabupaten.>, diakses pada 11 Desember 2022

untuk memperbesar peluang peningkatan kinerja.¹⁴ Pengembangan adalah suatu usaha yang bertujuan dan disengaja untuk menciptakan dan menyempurnakan suatu produk agar semakin bermanfaat bagi peningkatan mutu, dalam upaya menghasilkan mutu yang lebih baik.

d. BUMDesa

Definisi BUMDes menurut Maryunani, adalah lembaga perekonomian desa yang dijalankan oleh masyarakat desa dan pemerintah desa dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan membangun kohesi sosial berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.¹⁵ Jadi, BUMDes merupakan badan usaha yang artinya tugasnya adalah melakukan usaha untuk memperoleh suatu hasil seperti keuntungan atau laba.

e. Unit Usaha

Menurut Badan Pusat Statistik, unit usaha adalah suatu kesatuan yang melaksanakan kegiatan perseorangan, rumah tangga, atau usaha yang kewenangannya ditentukan berdasarkan letak fisik bangunan dan wilayah usahanya.¹⁶

Sedangkan Unit Usaha BUMDes atau Unit Usaha BUMDesa adalah badan usaha milik BUMDesa yang melaksanakan kegiatan

¹⁴ Hardjana, Agus M. 2001, *Training SDM yang Efektif*, Kanisius : Yogyakarta

¹⁵ Maryunani, " *Pengembangan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*", (Bandung : CV Pustaka Setia, 2008)

¹⁶ Badan Pusat Statistik, " *Definisi Unit Usaha*" dalam <http://www.bps.go.id/> Di akses pada 10 Desember 2022

bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.

f. Desa

Desa merupakan suatu permukiman yang memiliki ciri khas. Desa ini mempunyai hubungan yang erat dengan alam dan masyarakatnya sangat menghargai persatuan dan gotong royong.

Menurut R. Bintarto, desa adalah suatu bentukan geografis yang dibentuk oleh faktor fisik, sosial, ekonomi, politik, dan budaya setempat yang berhubungan dan berinteraksi dengan daerah lain.¹⁷

g. Potensi Desa

Endra K Pihadhi menjelaskan potensi adalah tenaga atau kinerja yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Potensi dalam hal ini diartikan sebagai kekuatan yang tersembunyi, yang dapat berupa kekuatan, minat, bakat, kecerdasan, dan lain-lain, namun tidak dimanfaatkan secara maksimal dan tidak dirasakan manfaatnya.¹⁸ Dapat diartikan potensi desa adalah segala sesuatu yang dimiliki desa tetapi tidak dimanfaatkan. Selama tidak dimanfaatkan, potensi daerah/desa tidak bermanfaat bagi masyarakat

2. Penegasan Secara Operasional

¹⁷ Bintarto, R. Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas. (2014), dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Desa>. (diakses 11 Desember 2022).

¹⁸ Ahmad Soleh, "Strategi Pengembangan Potensi Desa", jurnal sungkai, vol 5 (1), 2017, hal 36

Operasional adalah konsep abstrak untuk memfasilitasi pengukuran variabel atau juga dapat diartikan sebagai pedoman untuk melakukan suatu kegiatan atau penelitian. Maksud dari Analisis Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Pengembangan Unit Usaha milik BUMDes Berdasarkan Potensi Desa di Kabupaten Tulungagung adalah mempelajari dan menganalisa pengembangan unit usaha milik BUMDes yang dilakukan oleh Dinas PMD yang berkaitan dengan potensi desa sehingga menjadikan BUMDes dalam kategori maju.

G. Sistematika Penulisan

Kerangka skripsi adalah kerangka acuan yang digunakan untuk membuat skripsi dari awal hingga bab terakhir. Kerangka skripsi dibagi menjadi 3 bagian yaitu bagian awal skripsi, bagian inti skripsi, dan bagian akhir skripsi. Berikut penjelasannya:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian pertama skripsi bisa juga disebut halaman judul skripsi, yang terdiri dari halaman depan, lembar sampul dalam, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan tim penguji, kata pengantar, abstrak dan daftar isi.

2. Bagian Utama Skripsi

Bagian utama / inti skripsi bisa juga disebut sebagai isi skripsi, bagian ini dibagi menjadi beberapa sub bab sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini terdiri dari:

- a. Latar Belakang
- b. Fokus Penelitian
- c. Tujuan Penelitian
- d. Batasan Masalah
- e. Manfaat Penelitian
- f. Penegasan Istilah
- g. Sistematika Penulisan

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka ini terdiri dari:

- a. Kajian teori
- b. Hasil Penelitian Terdahulu

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis telah mengemukakan tentang apa saja metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang dalam hal ini meliputi:

- a. Pendekatan dan Jenis Penelitian
- b. Lokasi Penelitian

- c. Kehairan Peneliti
- d. Data dan Sumber Data
- e. Teknik Pengumpulan Data
- f. Teknik Analisis Data
- g. Pengecekan Keabsahan Temuan
- h. Tahap – Tahap Penelitian

BAB IV PAPARAN HASIL PENELITIAN

Bab ini mencakup deskripsi temuan penelitian dan pembahasan temuan, yang dikategorikan sebagai berikut :

- a. Deskripsi Objek Penelitian
- b. Paparan data

BAB V PEMBAHASAN

BAB VI PENUTUP

Bab ini terdiri dari :

- a. Kesimpulan
- b. Saran